



Munich Personal RePEc Archive

## **Indonesia in the ASEAN Economic Integration Framework**

Verico, Kiki

LPEM FEB UI

30 December 2015

Online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/85184/>  
MPRA Paper No. 85184, posted 14 Mar 2018 05:26 UTC

# Indonesia in the ASEAN Economic Integration Framework

*Kiki Verico\**

*“Trade eventually makes all actors better off”*

*(Adam Smith, 1776)*

## ***Abstract***

*An open economy is a natural given that no country could produce a product by itself. All countries need to cooperate in producing a product. Open economy starts from trade cooperation to investment cooperation before entering financial cooperation. Regarding trade, the ideal cooperation applies non-discriminative trade principle such as the WTO. However, it needs economic convergence within members of which practically, the world economy does not convergent. Regional economic cooperation happens to be an alternative as naturally stronger trade cooperation exist within countries with closer geographic proximity. Besides the advanced economic integration of the EU which achieved the ultimate aim of a single currency, in Southeast Asia, the ASEAN Economic Community indicates that it has potential to complete real sector integration towards monetary one. This paper argues that ASEAN is possible to succeed its economic community purpose utilizing its soft & open regionalism principle. This principle is compatible with the ASEAN plus framework of which Indonesia will gain much benefit from it.*

***Keywords:*** *economic cooperation; trade; investment; regional economic integration; the ASEAN Economic Community; Indonesia*

## A. Sebuah Keniscayaan Kerjasama Ekonomi<sup>i</sup>

Keterbukaan ekonomi memberikan manfaat untuk semua. Studi-studi menunjukkan bahwa negara yang terbuka secara ekonomi menikmati pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari negara yang relatif tertutup (Dollar and Kraay, 2001). Idealnya, kerjasama ekonomi bersifat global tanpa hambatan namun pada kenyataannya, *fair trade* sulit tercapai karena proteksi secara global baik dalam bentuk tarif, non-tarif, maupun subsidi tetap ada sehingga *free trade* menjadi sulit diwujudkan. Data empiris menunjukkan ketergantungan ekonomi memiliki pola yang lebih kuat pada tingkat kawasan sehingga derajat keterbukaan ekonomi terlihat lebih kuat di tingkat kawasan tinimbang global. Tulisan ini mencoba melihat peran kerjasama ekonomi kawasan bagi Indonesia sebagai solusi penting yang sub-optimal dari kerjasama global.

Hubungan ekonomi antarnegara umumnya berawal dari perdagangan lalu pada investasi dan produksi baik linier statis (*global value chain*) maupun non-linier dinamis (*global production networks*). Jika hubungan perdagangan antarnegara terjadi antara ‘produsen dan konsumen’, hubungan investasi dan jaringan produksi antarnegara terjadi antara ‘produsen dan produsen’ karena adanya perbedaan produktifitas antarprodusen di setiap negara. Studi empiris juga menunjukkan bahwa di dalam memproduksi sebuah produk, berdasarkan komponennya, produktifitas setiap negara berbeda pada tiap komponen<sup>ii</sup>.

Dari sisi kerjasama perdagangan, dalam beberapa tingkatan yang diikuti Indonesia, kerjasama global merupakan yang paling sulit karena masih adanya proteksi baik subsidi pertanian oleh negara maju maupun tarif bea masuk oleh negara berkembang. Perdagangan global masih terperangkap dalam *prisoner's dilemma* di mana setiap negara mencoba mempertahankan proteksi sehingga prinsip *fair and free trade* tidak bisa berjalan secara global. Pascal Lamy, mantan Dirjen WTO, pada tahun 2007 pernah mengungkapkan bahwa dunia membutuhkan kerjasama kawasan untuk mengatasi ‘kebuntuan’ kerjasama global ini<sup>iii</sup>.

Dari sisi kerjasama investasi dan jaringan produksi, kerjasama antarnegara Asia Tenggara sudah terjalin sejak lama bahkan sebelum ASEAN berdiri, misalnya melalui jaringan *the flying-geese model* di mana Jepang melibatkan beberapa negara Asia Tenggara dalam jaringan investasi dan produksinya seperti formasi angsa terbang berbentuk ‘V’ terbalik (Akamatsu, 1944).

Mengingat penting dan strategisnya kerjasama ekonomi kawasan karena tidak hanya mencakup sisi perdagangan namun juga investasi maka tulisan ini memilih fokus pembahasannya pada kerjasama ekonomi kawasan di mana Indonesia ada yaitu ASEAN. Selain itu, ASEAN saat ini berada pada titik yang paling karena mulai akhir tahun 2015 ASEAN resmi memasuki periode *ASEAN Economic Community* (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

## **B. Sudah Sejauh Mana ASEAN Melangkah?**

Pada tingkat kerjasama ekonomi kawasan Asia Tenggara, Indonesia memainkan peranan penting karena termasuk sebagai salah satu negara pendiri ASEAN bersama Malaysia, Thailand, Singapura dan Filipina pada 8 Agustus 1967. Sayangnya selama hampir 10 tahun pertama sejak ASEAN berdiri, tidak ada kerjasama ekonomi yang signifikan terjadi baik di perdagangan maupun investasi hingga terlaksananya *the 1<sup>st</sup> ASEAN Summit* pada Februari 1976 di Bali. Pertemuan pasca perang Vietnam ini sangat penting bagi kerjasama ekonomi ASEAN karena di sinilah lahirnya pondasi kerjasama ASEAN yaitu traktat perdamaian dan kerjasama (*Treaty of Amity and Cooperation*).

Prinsip dasar ASEAN adalah *non-interference principle* di mana setiap negara anggota ASEAN memiliki kebebasan untuk mengurus urusan dalam negerinya sendiri dan ASEAN tidak boleh ikut campur tangan. Prinsip ini membuat sifat kerjasama ASEAN menjadi *intergovernmentalism*, bukan *supranational body* seperti halnya Uni Eropa (UE). Sifat kerjasama ini berpengaruh pada mekanisme pengambilan keputusan di dalam ASEAN yang melalui musyawarah dan mufakat (*consultation and consensus*) bukan *voting* atau pemilihan suara. Prinsip dasar, sifat kerjasama dan mekanisme pengambilan keputusan di ASEAN membuat ia dikategorikan sebagai kerja kawasan lunak (*soft regionalism*) berbeda dengan UE yang berdasarkan hukum atau *legal binding* (*hard-regionalism*). Perbedaan kategori ini berdampak pada kerjasama ekonomi kawasan. UE lebih tertutup (*closed regionalism*) di mana harmonisasi kebijakan ekonomi dilakukan di bawah payung UE. Misalnya untuk penetapan tarif perdagangan UE memiliki harmonisasi untuk ke dalam yaitu antar anggota dan keluar yaitu antar anggota dan non-anggota (*Custom Union*). Ini berbeda dengan ASEAN yang hanya mengatur harmonisasi tarif perdagangan antar anggota dan tidak mengatur tarif perdagangan antara anggota dan non-anggota (*Free Trade Area*).

Pertemuan kepala negara tahun 1976 memberikan rekomendasi kerjasama ekonomi ASEAN berupa PTA (*Preferential Trade Arrangement*) dan AIP (*ASEAN Industrial Projects*) dengan dua skema *ASEAN Industrial Complementation Scheme* (AICS) dan *ASEAN Industrial Joint Venture Scheme* (AIJVS). PTA kemudian berkembang menjadi *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) sementara AIP menjadi dasar kerjasama industri dan investasi di ASEAN. Bila dibandingkan dengan UE, kerjasama ekonomi ASEAN berjalan lebih lambat. UE berada pada PTA sekitar 5 tahun, ASEAN memerlukan waktu 16 tahun dari 1976-1992. UE berada di FTA selama 10 tahun (1957-1967) hingga terbentuknya masyarakat ekonomi Eropa (*European Economic Community*) dengan sistem *Custom Union* (CU). Jika dihitung dari penandatanganan AFTA di 4<sup>th</sup> *ASEAN Summit* hingga ASEAN mulai memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA (*ASEAN Economic Community*) tahun 2015 maka ASEAN membutuhkan waktu 23 tahun untuk menyelesaikan FTA. Sejak tahun 2007 ASEAN berkomitmen untuk menuju kerjasama MEA. Ketika MEA dimulai tarif internal antarnegara anggota kawasan (*Common Effective Preferential Tariff/CEPT*) akan mencapai 0% baik di ASEAN-6 (Brunei, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand) maupun di ASEAN-4 (Laos, Kamboja, Myanmar dan Vietnam).

Rentang waktu yang lebih lama dalam menyempurnakan tahapan<sup>iv</sup> kerjasama ekonomi kawasan oleh ASEAN dibanding UE membuat ilmuwan memberikan klasifikasi tambahan untuk kerjasama ekonomi ASEAN yaitu *market driven* (tergantung pasar) sementara UE bersifat *government driven* (tergantung pemerintahan kawasan). Rentang waktu yang lama di setiap tahapan kerjasama ekonomi menunjukkan adanya kesenjangan antara cita-cita kerjasama ekonomi ASEAN dengan kenyataan di lapangannya. Namun bila ASEAN mampu mewujudkan tujuan utama MEA maka jalan menuju pasar tunggal ASEAN yang *free flows of trade, people and services*, dan jika ASEAN mau, menuju mata uang tunggal ASEAN bukanlah sesuatu yang mustahil.

### **C. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)**

Sejalan dengan latar belakang ini, tulisan ini akan mencoba menjawab: Mampukah ASEAN bergerak menuju kerjasama ekonomi kawasan yang lebih ketat seperti MEA 2015<sup>v</sup> jika bentuk organisasinya lunak (*soft*), terbuka (*open*) dan tergantung pasar (*market driven*)?

Untuk menjawab ini tulisan ini akan fokus pada dua komponen utama kerjasama ekonomi kawasan ketika sebuah kawasan bergerak dari perdagangan (AFTA) ke masyarakat ekonomi

(MEA) yaitu perdagangan dan investasi<sup>vi</sup>. Selain itu tulisan ini akan fokus pada Indonesia sebagai studi kasus. Tulisan ini mencoba memberikan cara pandang berdasarkan teori tentang apa itu kerjasama ekonomi kawasan khususnya terkait masyarakat ekonomi kawasan dan apa yang harus diperhatikan oleh organisasi kawasan (ASEAN) dan pemerintah anggota (Indonesia) di dalam menghadapinya.

#### **D. Tantangan & Peluang Ekonomi Indonesia di ASEAN**

Berdasarkan teori salah satu kunci keberhasilan integrasi ekonomi kawasan adalah adanya kepemimpinan. Secara empiris, berdasarkan pengalaman UE, kepemimpinan ini diterjemahkan dengan adanya negara yang besar (*in term of economic size of GDP and Population*) dan maju (*in term of GNI per Capita*). UE memiliki negara seperti Jerman dan Perancis yang memenuhi kriteria itu dan memiliki peran penting dalam proses integrasi ekonomi Eropa sementara ASEAN tidak. Di Asia Tenggara, ada negara yang besar secara ekonomi yaitu Indonesia namun bukan negara yang berpendapatan tinggi. Sebaliknya ada negara yang berpendapatan tinggi yaitu Singapura namun secara ukuran ekonomi tidak besar. Para ahli ekonomi kawasan menyebut kekuatan ekonomi ASEAN seperti ‘donut’ karena tidak ada negara yang paling dominan secara ekonomi. Bentuk ini cocok dengan sifat *intergovernmentalism* yang dipilih ASEAN. Gambaran kekuatan ekonomi ASEAN dapat dilihat pada 2 (dua) grafik berikut (lihat **Grafik 1** dan **Grafik 2**).

#### **E. Tantangan Ekonomi Indonesia di ASEAN**

Data dari Grafik 2 dapat dipergunakan untuk mengukur produktifitas rata-rata Indonesia di kawasan dengan membuat perbandingan proporsi PDB Indonesia per total PDB ASEAN terhadap proporsi populasi Indonesia per total populasi ASEAN. Hasilnya menunjukkan bahwa produktifitas Indonesia di kawasan ASEAN masih rendah karena kurang dari 1 (satu) di mana semua negara yang pendapatan per kapita nya (*GNI per Capita*) lebih tinggi dari Indonesia memiliki tingkat produktifitas di kawasan lebih dari 1 (satu). Perbandingan selengkapnya bisa dilihat pada **Grafik 3**.

Perbandingan produktifitas negara dalam kawasan sejalan dengan data daya saing (*the Global Competitiveness Index*) yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum* (WEF) di mana posisi Indonesia berada di bawah Singapura, Brunei, Malaysia dan Thailand (lihat **Tabel 1**). Jika dilihat dari data *Doing Business* Bank Dunia ranking Indonesia untuk kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) bahkan lebih rendah dari Vietnam dan Filipina (lihat **Tabel 2**). Dari

10 indikator yang digunakan Bank Dunia, Indonesia hanya unggul dari Vietnam dan Filipina pada indikator perlindungan investor (*Protecting Investor*).

Gambaran serupa juga terlihat pada perbandingan daya saing perdagangan (*comparative advantage*)<sup>vii</sup>, di mana Indonesia hingga kini masih mengandalkan keunggulan ekspor hasil alam (pertanian, dan pertambangan) dan industri teknologi menengah ke bawah (makanan) dan industri padat karya (tekstil dan pakaian). Sementara Malaysia, Thailand, Filipina bahkan Vietnam sudah mencapai keunggulan pada sektor industri berteknologi menengah atas yang membutuhkan pekerja ahli (lihat **Tabel 3**). Tabel ini juga menunjukkan bahwa Indonesia tengah menghadapi defisit perdagangan (nilai ekspor lebih kecil dari nilai impor) pada produk tekstil padahal ia merupakan produk unggulan Indonesia dengan nilai RCA (*Revealed Comparative Advantage*) lebih dari 1 (satu).

Dengan data yang lebih rinci menggunakan HS-2 (*Harmonized System 2 digit*) dapat dipetakan 4 (empat) kuadran kekuatan dan kelemahan ekspor Indonesia. Kuadran ini diperoleh dengan menggabungkan perhitungan ekspor bersih (selisih nilai ekspor dan impor) dan perbandingan harga ekspor dan harga impor ( $P_{\text{export}}/P_{\text{import}}$ ) tiap produk. Jika harga ekspor lebih rendah dari harga impor dan nilai ekspor bersih positif maka produk itu adalah ‘produk kuat’ namun jika nilai ekspor negatif maka produk itu ‘lemah’. Jika harga ekspor lebih mahal dari harga impor dan nilai ekspor bersih negatif maka produk itu ‘sangat lemah’ sementara jika nilai ekspor positif maka produk itu ‘sangat kuat’.

Saat ini 19,6% dari seluruh total produk Indonesia adalah produk klasifikasi ‘kuat’, 24,7% ‘sangat lemah’, 20,6% adalah ‘sangat kuat’ dan 35,1% adalah ‘lemah’. Silahkan dilihat rincian produknya pada **Tabel 4**. Bila dibuat prioritas untuk meningkatkan daya saing ekspor nasional di tingkat kawasan dan global maka prioritas harus dimulai dari produk ‘sangat lemah’, produk ‘lemah’, produk ‘sangat kuat’ lalu produk ‘kuat’. Peningkatan daya saing sangat membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, kualitas penelitian, perbaikan infrastruktur, efisiensi produksi dan peningkatan kapasitas produksi. Upaya peningkatan ini membutuhkan kerjasama dengan negara lain dalam hal investasi fisik atau jaringan produksi.

Dalam upaya meningkatkan nilai tambah ekonomi Indonesia harus berhadapan dengan kenyataan bahwa tingkat pendidikan nasional masih rendah di mana 75% penduduk hanya memiliki ijazah SMP ke bawah, kapasitas pajak belum optimal akibat dominasi sektor informal

yaitu sekitar 65% dan rendahnya nilai tambah ekonomi kewirausahaan (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap dan berusaha dibantu buruh tetap) yang masih mengandalkan usaha berskala kecil.

## **F. Peluang Ekonomi Indonesia di ASEAN**

Kendati belum memiliki tingkat produktifitas dan daya saing yang baik, Indonesia yang secara ukuran ekonomi masih terbesar di ASEAN dengan kontribusi pada PDB ASEAN sekitar 38% dan jumlah penduduk mencapai 41% dari penduduk ASEAN. Indonesia juga cukup berhasil memanfaatkan kerjasama perdagangan kawasan dan investasi asing jangka panjang kawasan (*FDI inflows*). Dari data Sekretariat ASEAN Tabel 25, diketahui bahwa 46,6% investasi asing jangka panjang (*FDI inflow*) negara ASEAN masuk ke Indonesia disusul Singapura dengan 24,1%. Sementara untuk investasi yang berasal dari luar negara ASEAN, Singapura masih sangat dominan karena menarik sekitar 56% dari total investasi asing jangka panjang (*FDI inflow*) yang berasal dari luar ASEAN disusul Indonesia di peringkat kedua dengan proporsi sekitar 12%. Data selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 5**. Rata-rata investasi jangka panjang ASEAN yang masuk ke Asia Tenggara pada tahun 2012 sekitar 15% sementara 75% investasi tersebut berasal dari luar anggota ASEAN. Data Indonesia menunjukkan 43% investasi asing jangka panjang berasal dari ASEAN atau hampir 3 (tiga) kali lebih tinggi dari rata-rata ASEAN. Data selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 6**.

Komposisi ini menunjukkan jika ASEAN memperluas kerjasama ekonomi khususnya perdagangan dan investasi dengan negara lain seperti dalam kerangka *ASEAN China Free Trade Area (ACFTA)* maka negara yang paling besar berpeluang mendapatkan manfaat masuknya investasi asing jangka panjang dari negara anggota baru ASEAN adalah Indonesia. Secara empiris dapat terlihat dari naiknya investasi jangka panjang Tiongkok di Indonesia dari 1995-2006 ke 2005-2010. Sebelum proses ACFTA dirintis, investasi jangka panjang Tiongkok dominan masuk ke Singapura yaitu sekitar 34% dari total investasi Tiongkok di ASEAN dan disusul Indonesia sekitar 30,6%. Namun setelah proses ACFTA selesai di tahun 2010, investasi asing Tiongkok di Indonesia sekitar 9,8 miliar US\$ melebihi investasi Tiongkok di Singapura sekitar 7 miliar US\$<sup>viii</sup>.

Peluang Indonesia yang lain di ASEAN dapat dilihat dari proporsi perdagangan Indonesia di Asia Tenggara (*intra-regional trade*). Kontribusi perdagangan Indonesia di ASEAN mencapai 16,6%, nomor 4 terbesar setelah, Singapura (34,4%), Thailand (18,6%) dan Malaysia

(18,1%). Data selengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 7**. Sementara jika dibandingkan perdagangan antar negara dalam kawasan dan dengan negara di luar kawasan, ASEAN masih lebih banyak berdagang dengan negara di luar Asia Tenggara. Perdagangan ASEAN ke ASEAN adalah sekitar 25% sementara perdagangan ASEAN dengan negara di luar ASEAN mencapai sekitar 75% dari total perdagangan ASEAN. Kendati masih relatif kecil misalnya dibandingkan dengan perdagangan antar negara dalam kawasan (*intra-regional trade*) UE yang mencapai lebih dari 60% namun perdagangan negara dalam kawasan ASEAN telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak ASEAN mencanangkan AFTA pada tahun 1992.

Masih dominannya perdagangan dengan negara di luar kawasan ASEAN juga terlihat pada pengujian faktor internal dan eksternal Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Hasil pengujian kesiapan ASEAN dalam menghadapi MEA menunjukkan bahwa ASEAN lebih siap menghadapi persaingan global (*fully integrated region in the global economy*) dan menjadi kawasan ekonomi yang kompetitif (*competitive economic region*) ketimbang menjadi pasar tunggal dan basis produksi kawasan (*single market and production base*) dan ekonomi kawasan yang berkeadilan (*equitable economic development*). Selengkapnya hasil pengujian *ASEAN Economic Community (AEC Scorecard)* dapat dilihat pada tautan<sup>ix</sup>. Dari sisi perdagangan, baik indikator perdagangan kawasan (*intra-regional trade*) maupun hasil pengujian persepsi kesiapan menghadapi MEA (*AEC Scorecard*) ASEAN lebih siap menghadapi lingkungan global tinimbang menghadapi masalah internalnya terkait bentuk kerjasamanya yang lunak (*soft*), terbuka (*open*) dan tergantung pasar (*market driven*).

Dari sisi kerjasama investasi, ketiga sifat ASEAN ini justru menguntungkan. Hasil studi Urata & Okabe (2007) menunjukkan bahwa AFTA lebih efektif meningkatkan perdagangan antar negara anggota dalam kawasan (*trade creation*) tinimbang pengalihan perdagangan dari negara non-anggota ke negara anggota (*trade diversion*) seperti UE. Potensi investasi ASEAN akan lebih banyak berasal dari negara anggota baru yang menikmati manfaat kerjasama AFTA. Oleh karena itu, perluasan kerjasama perdagangan ASEAN ke negara non-ASEAN yang berpotensi mendatangkan investasi asing jangka panjang akan efektif meningkatkan investasi internal ASEAN. Seperti halnya kerjasama ACFTA yang dapat meningkatkan investasi Tiongkok di ASEAN. Studi Park et.al (2008) menunjukkan bahwa di dalam kerjasama ACFTA, *trade creation* juga lebih besar dari *trade diversion* sehingga potensi investasi akan berasal dari negara yang paling diuntungkan secara perdagangan di kawasan ini adalah Tiongkok. Proses internalisasi negara non-anggota ini bisa efektif justru pada kawasan yang

menganut sistem terbuka (*open regionalism*) seperti halnya ASEAN. Pola ini disebut *outward-looking regional integration* (Soesastro, 2001), *ASEAN plus framework* (Asian Survey, 2009) atau *region-wide of FTA* (ADBI, 2011)<sup>x</sup>.

Namun menjadi catatan bahwa pada saat yang sama *trade creation* akan menghasilkan ‘biaya’ yang harus ditanggung oleh pengusaha lokal negara anggota yang tidak kompetitif. Di sinilah terjadi dilema khususnya bagi negara yang berpotensi terkena dampak yaitu negara yang kewirausahaannya masih didominasi oleh sektor informal yang bernilai tambah rendah dengan kualitas SDM yang rendah seperti Indonesia. Kondisi ini menjelaskan mengapa kerjasama kawasan seperti AFTA, ACFTA dan lain lain di Indonesia seperti ‘benci tapi rindu’, di satu sisi ditentang oleh pengusaha lokal yang gagal bersaing sementara di sisi lain didukung oleh pengusaha lokal yang berpotensi bekerjasama atau mendapatkan manfaat dari hadirnya investasi asing. Hal penting yang harus diperhatikan di dalam menyikapi dilema ini adalah jangan sampai keputusan ‘populis’ memperburuk kredibilitas Indonesia di mata negara mitra ekonomi baik bilateral, regional maupun global. Salah satu tantangan di sini justru berasal dari peraturan terkait kerjasama perdagangan internasional oleh Undang-Undang RI No.7/2014 yang baru disahkan DPR awal tahun ini<sup>xi</sup>.

Kerjasama MEA 2015 adalah sebuah ‘tahapan kunci’ yang akan sangat penting bagi peningkatan integrasi ekonomi kawasan di Asia Tenggara. Salah satu ciri pokoknya adalah transformasi kerjasama dari *intra-regional trade* ke *intra-regional investment*. Transformasi ini akan berjalan baik jika ASEAN dapat memanfaatkan pola *ASEAN-wide regionalism* lewat prinsip keterbukaan (*open-regionalism*) dengan baik. Selain itu potensi internal akan diperoleh dari konvergensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Data tahun 2012 menunjukkan bahwa negara anggota ASEAN yang pendapatan per kapita nya di bawah US\$ 1,035 (*Low Income Country/LIC*) seperti Kamboja dan Myanmar tumbuh sangat cepat sementara negara anggota berpendapatan tinggi seperti Singapura dan Brunei tumbuh pelan di bawah 3% per tahun. Ekonomi Myanmar pada tahun 2012 bahkan tumbuh lebih dari 10% yaitu mencapai 13,64%. Silahkan dilihat data selengkapnya pada **Tabel 8**.

Potensi investasi dalam kawasan (*intra-regional investment*) tidak hanya berasal dari negara yang masuk dalam kerangka kerjasama ASEAN+1 FTA tetapi juga berasal dari negara orisinil ASEAN seperti dari Singapura dan Malaysia. Pola ini membuktikan bahwa investor jangka

panjang (vertical FDI inflows) telah mulai bergeser dari generasi pertama yaitu negara di luar kawasan ke generasi kedua yaitu negara dalam kawasan (Vernon, 1966).

Cepatnya pertumbuhan ekonomi negara anggota berpendapatan rendah akan mengantarkan negara anggota pada satu titik konvergensi ekonomi seperti apa yang dialami UE yang hanya memiliki dua kategori pendapatan, negara berpendapatan tinggi (*High Income Country/HIC*) dan menengah ke atas (*Upper Middle Income Country/UMC*). ASEAN sampai saat ini masih menghadapi kesenjangan ekonomi antarnegara anggota karena kategori negara sangat beragam, lengkap dari berpendapatan rendah (LIC) yaitu Kamboja dan Myanmar, menengah ke bawah (*Lower Middle Income Country/LMIC*) yaitu Indonesia, Filipina, Vietnam dan Laos, menengah ke atas (*UMIC*) yaitu Malaysia dan Thailand dan berpendapatan tinggi (HIC) yaitu Singapura dan Brunei.

Kombinasi kerjasama kawasan yang terbuka (*open-regionalism*) dan konvergensi ekonomi anggota akan membantu ASEAN mencapai target utama MEA karena akan terjadi peningkatan investasi dan perdagangan kawasan. Setelah itu tercapai percepatan arus barang, tenaga kerja, jasa terkait perdagangan dan sektor jasa secara luas hingga mencapai Pasar Tunggal ASEAN (*ASEAN Common Market*). Bila ini tercapai maka tidak sulit bagi ASEAN untuk mencapai pasar uang tunggal baik dalam bentuk *Single Monetary Union* maupun *Single Currency*<sup>xii</sup>.

Selain itu yang perlu diperhatikan dalam membangun kerjasama ekonomi yang tidak hanya menguntungkan kawasan tetapi juga Indonesia adalah kecukupan pengetahuan dan informasi atas apa yang dirundingkan dan kepercayaan diri pemerintah baik ketika negosiasi maupun implementasi. Kepercayaan diri yang tinggi bersumber pada kekuatan ‘mental’ bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kuat sehingga di masa depan hal-hal berikut bisa dihindari. Sebagai contoh, beberapa studi menunjukkan bahwa (1) Beberapa perjanjian FTA Plus dengan negara mitra membuka sektor jasa (*non-tradable*) Indonesia kendati sebaiknya FTA hanya mencakup liberalisasi arus barang (*tradable goods*). (2) Pada keterbukaan investasi, implementasi di Indonesia bisa lebih liberal dari perjanjiannya. Misalnya pada perjanjian AFAS (*ASEAN Framework Agreement on Services*), kepemilikan asing pada bank maksimal hanya 51%, namun dalam pelaksanaannya mencapai 99%. Selain itu keterbukaan investasi di sub-sektor komunikasi (jaringan HP dan internet) mencapai 65% dengan kepemilikan data mencapai 95%. Kemampuan negosiasi yang baik dan implementasi yang diikuti dengan pengawasan lapangan yang konsisten adalah dua hal yang sangat penting di dalam membangun

kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Ini tidak hanya membutuhkan pengetahuan dan informasi yang cukup namun juga ‘kekuatan mental’ pemerintah, baik negosiator maupun pelaksananya.

## **G. Rekomendasi**

Rekomendasi kebijakan berdasarkan analisis di atas adalah: *Pertama*, pada tingkat kawasan, di dalam menyambut MEA 2015, Indonesia perlu mendukung perluasan kerjasama ASEAN dengan negara-negara mitra dagang dan investasi melalui kerangka *ASEAN wide regionalism*. Perluasan yang lebih bersifat evolusi, dimulai dari perdagangan dan investasi, akan lebih efektif karena cocok dengan karakter dasar ASEAN yang lunak (*soft*), terbuka (*open*) dan *market driven*. Kerangka perluasan kerjasama yang paling tepat adalah AFTA Plus.

*Kedua*, pada tingkat negara anggota, dalam hal ini Indonesia, pemahaman atas dilema dari kerjasama kawasan menjadi penting. Di satu sisi kerjasama ini membawa manfaat pada investasi namun di sisi lain muncul biaya yang harus ditanggung oleh pengusaha lokal yang tidak mampu bersaing dengan pengusaha dari negara kawasan sendiri (*trade creation*). *There is always something you gave up to get it*. Setiap pilihan melahirkan biaya dan pilihan terbaik adalah pilihan yang biaya konsekuensi (*opportunity cost*) nya paling kecil. Pilihan itu adalah tetap ikut bekerjasama di dalam kerangka ekonomi kawasan dan memaksimalkan manfaatnya dari investasi. Di bagian analisis, tulisan ini menunjukkan Indonesia adalah negara penerima proporsi tertinggi investasi kawasan (*intra-ASEAN investment*) yang menunjukkan bahwa Indonesia menerima manfaat besar dari kerjasama ASEAN khususnya AFTA.

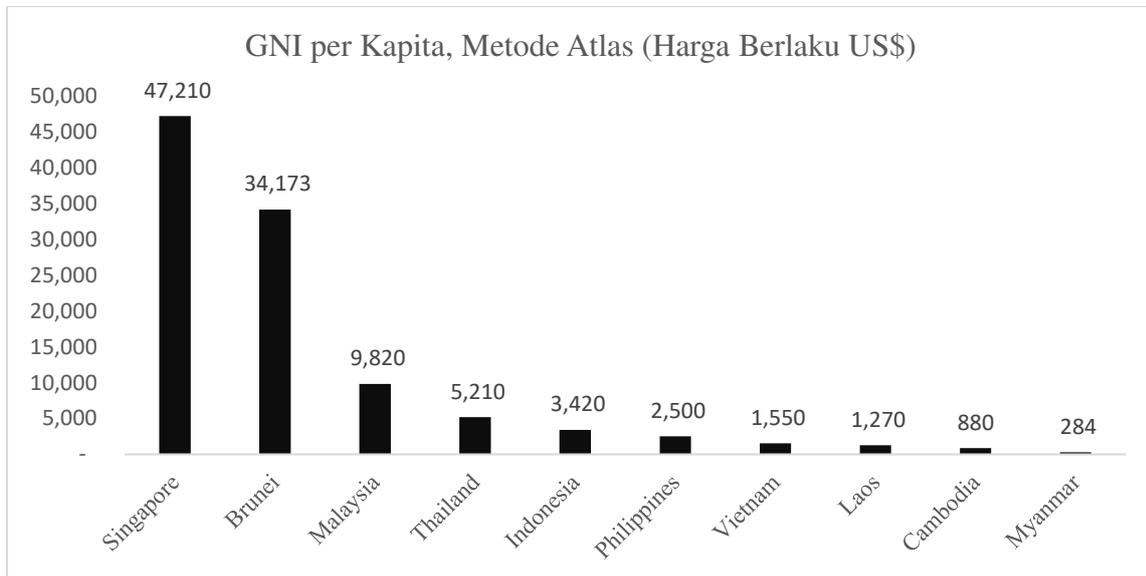
*Ketiga*, karena menerima manfaat besar dari kerjasama kawasan dari sisi investasi (*FDI inflows*), Indonesia harus bijaksana dalam menyikapi biaya yang ditimbulkan (*trade creation*). Reaksi atas biaya yang terjadi tidak boleh memperburuk situasi. Proteksi dan semua bentuk upaya yang menghalangi Indonesia untuk ikut bekerjasama dalam ekonomi kawasan harus dikaji secara mendalam sehingga tidak membahayakan posisi dan kredibilitas Indonesia di mata ASEAN dan dunia. Salah satu contohnya adalah kebijakan ekonomi kawasan yang sudah disepakati Indonesia pada pertemuan kepala negara kawasan (*ASEAN Summit*) yang tentu saja telah memakan waktu lama dalam proses negosiasi sebelum penandatanganan sehingga tidak boleh dengan mudah dibatalkan sepihak oleh Indonesia tanpa perhitungan yang matang apalagi bila hanya berdasar ‘sentimen politik’ atau desakan ‘rente ekonomi’. Keputusan yang populer

namun *gegabah* tidak hanya akan menurunkan kepercayaan negara mitra ekonomi pada Indonesia namun juga merugikan ekonomi Indonesia secara relatif terutama jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang tetap menjalin hubungan ekonomi internasional dengan baik.

*Keempat*, keterbukaan ekonomi harus dilakukan dengan sistematis dan strategis. Sistematis mengandung arti bahwa keterbukaan harus dimulai dari menghilangkan hambatan yang membuat biaya ekonomi menjadi mahal. Salah satu alat analisis yang bisa dilakukan untuk mencari prioritas dari pilihan yang ada pada *cost of doing business* dan *investment climate* adalah *Regulatory Impact Assessment (RIA)*. Analisis ini dapat memberikan gambaran tentang biaya dan manfaat dari setiap pilihan kebijakan sehingga sangat bermanfaat untuk menentukan prioritas apa yang dapat diambil dari pilihan-pilihan yang tersedia. Strategis mengandung arti, dalam hal negosiasi kerjasama ekonomi mulai dari tingkat global hingga bilateral harus dilakukan dengan cermat dan tepat. Syarat pentingnya adalah ketersediaan informasi yang memadai sementara syarat cukupnya adalah kekuatan ‘mental’ negosiator untuk tidak merasa *inferior* setiap kali melakukan perundingan. Informasi yang cukup dan pengetahuan yang memadai tidak akan efektif membawa Indonesia pada posisi *win-win solution* bila mental negosiator tidak kuat karena kekuatan mental adalah sumber percaya diri.

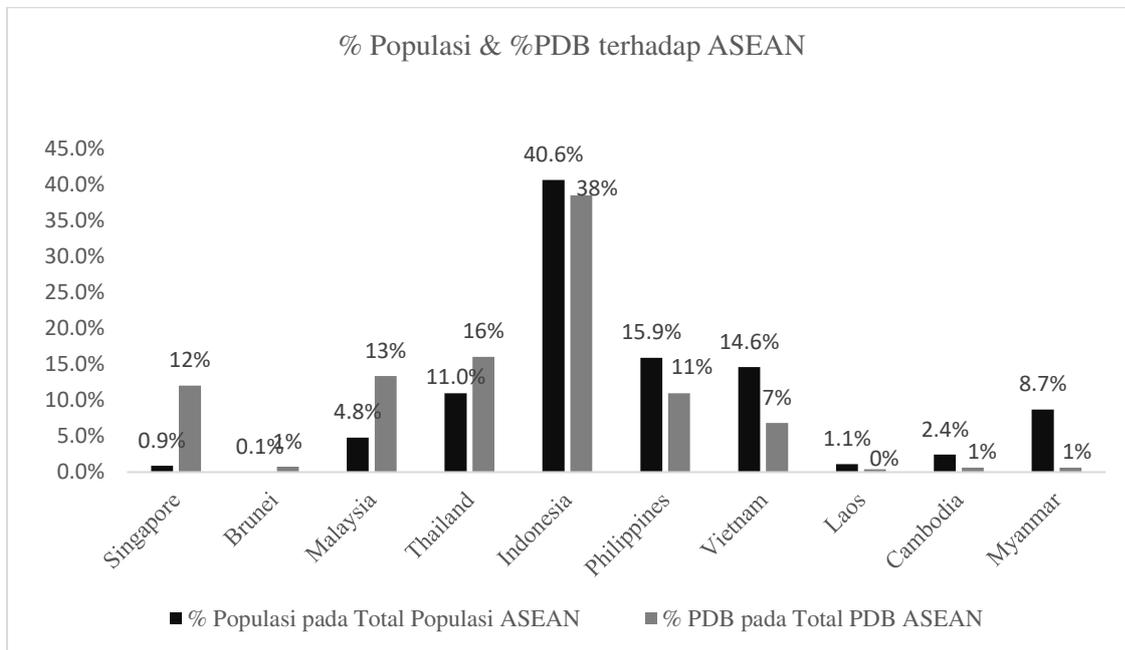
## H. Lampiran

**Grafik 1. GNI per Kapita Negara ASEAN, 2012**



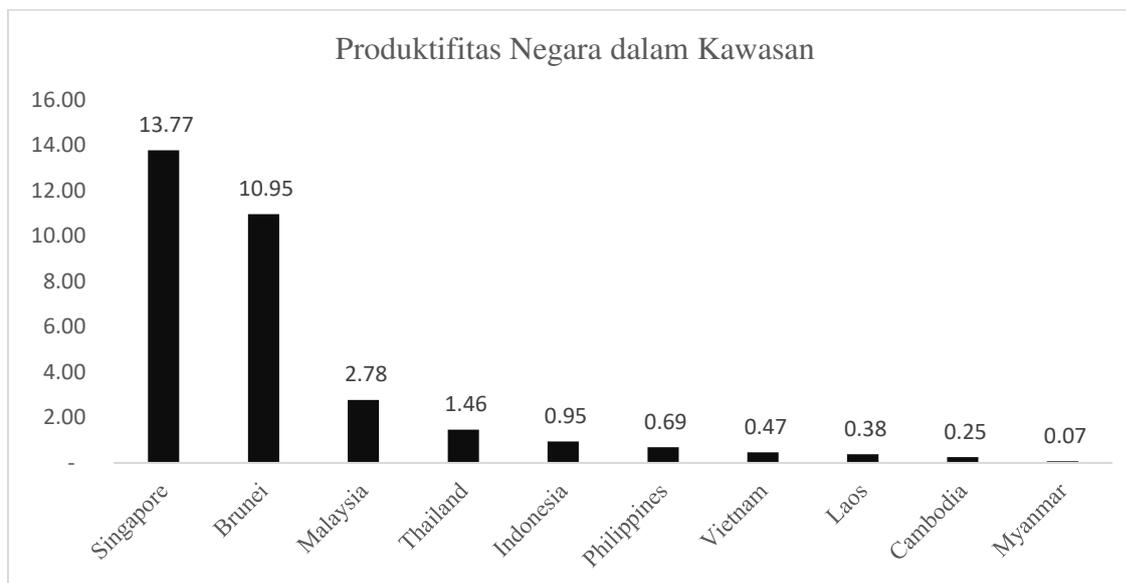
Sumber: Diolah sendiri menggunakan data WDI Bank Dunia

**Grafik 2. %Populasi dan %PDB terhadap ASEAN, 2012**



Sumber: Diolah sendiri menggunakan data WDI Bank Dunia

**Grafik 3. Produktifitas Negara Anggota Kawasan, ASEAN, 2012**



Sumber: Diolah sendiri menggunakan data WDI Bank Dunia

**Tabel 1. Global Competitiveness Index (GCI)**

Negara	Ranking GCI		Skor
	2011-2012	2012-2013	2012-2013
Singapura	1	1	5.72
Malaysia	21	25	5.06
Brunei	28	28	4.87
Thailand	39	38	4.52
Indonesia	46	50	4.4
Filipina	75	65	4.23
Vietnam	65	75	4.11
Kamboja	97	85	4.01

Sumber: Disusun sendiri menggunakan data GCI, World Economic Forum (WEF)

**Tabel 2. Cost of Doing Business (CODB) 2012**

Negara	Ease of Doing Business	Starting a Business	Dealing with Construction Permits	Getting Electricity	Registering Property	Getting Credit	Protecting Investors	Paying Taxes	Trading Across Borders	Enforcing Contracts	Resolving Insolvency
Singapura	<b>1</b>	3	3	6	28	3	2	5	1	12	4
Malaysia	<b>6</b>	16	43	21	35	1	4	36	5	30	42
Thailand	<b>18</b>	91	14	12	29	73	12	70	24	22	58
Brunei	<b>59</b>	137	46	29	116	55	115	20	39	161	48
Vietnam	<b>99</b>	109	29	156	51	42	157	149	65	46	149
Filipina	<b>108</b>	170	99	33	121	86	128	131	42	114	100
Indonesia	<b>120</b>	175	88	121	101	86	52	137	54	147	144
Kamboja	<b>137</b>	184	161	134	118	42	80	65	114	162	163
Laos	<b>159</b>	85	96	140	76	159	187	119	161	104	189
Myanmar	<b>182</b>	189	150	126	154	170	182	107	113	188	155

Sumber: Disusun sendiri menggunakan data DoingBusiness, Bank Dunia

**Tabel 3. Revealed Comparative Advantage (RCA) dan Nilai Ekspor Bersih (Net Export), 2012**

<b>Negara</b>	<b><i>RCA&gt;1 &amp; NX&gt;0</i></b>	<b><i>RCA&gt;1 &amp; NX&lt;0</i></b>
Brunei	<i>Fuels and Mining Products</i>	<i>None</i>
Kamboja	<i>Clothing and Manufactures</i>	<i>None</i>
Indonesia	<i>Agriculture Products, Food, Fuels and Mining, Clothing</i>	<i>Textiles</i>
Malaysia	<i>Agriculture Products, Food, Office and Telecom Equipment, Electronic Data Processing and Office Equipment, Telecommunications, Integrated circuits and electronic components equipment</i>	<i>Machinery and Transport Equipment</i>
Myanmar	<i>Agricultural products, Food, Fuels and mining products, Clothing</i>	<i>None</i>
Filipina	<i>Manufactures, Machinery and transport equipment, Office and telecom equipment, Electronic data processing and office equipment, Integrated circuits and electronic ,Clothing</i>	<i>None</i>
Singapura	<i>Chemicals, Machinery and transport equipment, Office and telecom equipment, Electronic data processing and office equipment, Integrated circuits and electronic components</i>	<i>None</i>
Thailand	<i>Agricultural products, Food, Manufactures, Machinery and transport equipment, Office and telecom equipment, Electronic data processing and office equipment, Telecommunications equipment, Transport equipment, Automotive products</i>	<i>Integrated circuits and electronic components</i>
Vietnam	<i>Agricultural products, Food, Office and telecom equipment, Electronic data processing and office equipment, Telecommunications equipment, Clothing</i>	<i>Manufactures and Textiles</i>

Sumber: Diolah sendiri menggunakan data WTO (HS-1), ASEAN

**Tabel 4. Harga Ekspor per Harga Impor (PX/PM) dan Nilai Ekspor Bersih (*Net Export*), Indonesia, 2012**

<b>Klasifikasi 'Kuat'</b>	<b>NX</b>	<b>PX/PM</b>
<i>Musical Instruments; parts &amp; accessories thereof</i>	356,447,007	0.98
<i>Furniture; Bedding, Mattresses, Cushions etc.; other Lamps &amp; Light Fitting, Illumine</i>	1,320,168,092	0.95
<i>Manmade Staple Fibers, including Yarns &amp; Woven Fabrics</i>	938,491,367	0.89
<i>Miscellaneous Edible Preparations</i>	18,240,799	0.86
<i>Manmade Filaments, including Yarns &amp; Woven Fabrics</i>	207,142,066	0.84
<i>Rubber &amp; Articles thereof</i>	7,850,914,173	0.82
<i>Nickel &amp; articles thereof</i>	941,938,373	0.78
<i>Preparations of Vegetables, Fruit, Nuts or other Plant parts</i>	107,036,166	0.76
<i>Preparations of Cereals, Flour, Starch or Milk; Bakers Wares</i>	349,657,892	0.74
<i>Cocoa &amp; Cocoa Preparations</i>	876,553,224	0.74
<i>Glass and Glassware</i>	16,996,242	0.58
<i>Paper &amp; Paperboard &amp; articles thereof; Paper Pulp articles</i>	2,580,040,864	0.52
<i>Animal or Vegetable Fats &amp; Oils &amp; their Cleavage products; Prepared Edible Fats; A</i>	21,100,547,070	0.46
<i>Live Trees, Plants; Bulbs, Roots; Cut Flowers &amp; Ornamental Foliage</i>	23,708,128	0.44
<i>Soap; Waxes; Polish; Candles; Modelling Pastes; Dental Preparations with Basis of</i>	450,560,380	0.43
<i>Miscellaneous Chemical products</i>	2,043,278,306	0.38
<i>Ores, Slag &amp; Ash</i>	4,727,617,054	0.16
<i>Mineral Fuels, Mineral Oils &amp; products of their Distillation; Bitumen Substances;</i>	20,620,919,646	0.15
<i>Vegetable Plaiting Materials &amp; other Vegetable Products</i>	29,079,913	0.14

Sumber: Diolah sendiri menggunakan data WTO (HS-2), Indonesia

**Tabel 4. Harga Ekspor per Harga Impor (PX/PM) dan Nilai Ekspor Bersih (*Net Export*), Indonesia, 2012**

<b>Klasifikasi ‘ Sangat Lemah’</b>	<b>NX</b>	<b>PX/PM</b>
<i>Umbrellas, Walking-sticks, Seat-sticks, Riding-crops, Whips, &amp; parts thereof</i>	-14,630,380	6.79
<i>Clocks &amp; Watches &amp; parts thereof</i>	-35,562,063	5.02
<i>Pharmaceutical Products</i>	-145,628,816	4.38
<i>Ships, Boats &amp; Floating Structures</i>	-989,053,976	3.55
<i>Cork &amp; articles of Cork</i>	-4,211,580	2.48
<i>Tools, Implements, Cutlery, Spoons &amp; Forks of Base Metal &amp; parts thereof</i>	-497,178,360	2.10
<i>Iron &amp; Steel</i>	-9,263,764,681	2.07
<i>Ceramic products</i>	-81,122,025	2.04
<i>Raw Hides &amp; Skins (other than Furskins) and Leather</i>	-274,753,024	2.01
<i>Wadding, Felt and Nonwovens; Special Yarns; Twine, Cordage, Ropes &amp; Cables &amp; articles</i>	-200,937,261	1.84
<i>Optical, Photographic, Cinematographic, Measuring, Checking, Precision, Medical o</i>	-1,439,736,068	1.76
<i>Other Base Metals; Cermet; articles thereof</i>	-110,895,841	1.67
<i>Dairy products; Birds' Eggs; Honey &amp; Other Edible Animal products</i>	-888,538,111	1.60
<i>Cereals</i>	-3,694,060,820	1.49
<i>Miscellaneous articles of Base Metal</i>	-478,057,323	1.37
<i>Milling products; Malt; Starch; Inulin; Wheat Gluten</i>	-580,051,753	1.22
<i>Nuclear Reactors, Boilers, Machinery &amp; Mechanical appliances; parts thereof</i>	-22,326,514,850	1.22
<i>Miscellaneous Manufactured Articles</i>	-201,790,961	1.22
<i>Meat &amp; Edible Meat Offal</i>	-148,243,748	1.17
<i>Cotton, including Yarn &amp; Woven Fabric thereof</i>	-1,803,168,151	1.17
<i>Pulp of Wood or of other Fibrous Cellulosic Material; Waste &amp; Scrap of Paper &amp; Pa</i>	-4,491,820	1.14
<i>Lead &amp; articles thereof</i>	-189,695,556	1.09
<i>Fertilizers</i>	-2,069,926,858	1.07
<i>Vehicles, (not railway, tramway, rolling stock); parts &amp; accessories</i>	-4,900,109,267	1.05

Sumber: Diolah sendiri menggunakan data WTO (HS-2), Indonesia

**Tabel 4. Harga Ekspor per Harga Impor (PX/PM) dan Nilai Ekspor Bersih (*Net Export*), Indonesia, 2012**

<b>Klasifikasi 'Sangat Kuat'</b>	<b>NX</b>	<b>PX/PM</b>
<i>Natural or Cultured Pearls, Precious or Semiprecious Stones, Precious Metals &amp; Me</i>	2,775,313,309	28.86
<i>Works of Art, Collectors' Pieces &amp; Antiques</i>	16,207,250	4.24
<i>Prepared Feathers, Down &amp; articles thereof; Artificial Flowers; articles of Human</i>	255,858,297	3.64
<i>Leather articles; Saddlery &amp; Harness; Travel Goods, Handbags &amp; similar; articles</i>	123,889,537	3.23
<i>Toys, Games &amp; Sports Equipment; parts &amp; accessories</i>	200,255,512	3.19
<i>Footwear, Gaiters &amp; the like &amp; parts thereof</i>	3,137,576,008	2.77
<i>Fish, Crustaceans &amp; Aquatic Invertebrates</i>	2,545,134,675	2.34
<i>Headgear &amp; parts thereof</i>	14,452,344	2.13
<i>Apparel articles &amp; accessories, Knitted or Crocheted</i>	3,273,793,690	1.91
<i>Apparel articles and accessories, not Knitted or Crocheted</i>	3,531,737,556	1.88
<i>Other Textile articles; Needlecraft Sets; Worn Clothing and Worn Textile Articles</i>	313,536,731	1.84
<i>Wood &amp; articles of Wood; Wood Charcoal</i>	3,047,301,998	1.63
<i>Manufactures of Straw, Esparto or other Plaiting Materials; Basket ware &amp; Wickerwork</i>	82,314,606	1.63
<i>Tin &amp; articles thereof</i>	2,101,547,078	1.60
<i>Edible Preparations of Meat, Fish, Crustaceans, Mollusks or other Aquatic invertebrate</i>	816,320,843	1.56
<i>Carpets &amp; other Textile Floor Coverings</i>	34,646,169	1.54
<i>Coffee, Tea, Mate &amp; Spices</i>	1,761,351,488	1.52
<i>Tobacco &amp; Manufactured Tobacco Substitutes</i>	28,613,835	1.47
<i>Copper &amp; articles thereof</i>	696,266,085	1.44
<i>Beverages, Spirits &amp; Vinegar</i>	46,824,424	1.03

Sumber: Diolah sendiri menggunakan data WTO (HS-2), Indonesia

**Tabel 4. Harga Ekspor per Harga Impor (PX/PM) dan Nilai Ekspor Bersih (*Net Export*), Indonesia, 2012**

<b>Klasifikasi 'Lemah'</b>	<b>NX</b>	<b>PX/PM</b>
<i>Electric Machinery, Equipment &amp; parts; Sound Equipment; Television Equipment</i>	-8,139,868,704	0.96
<i>Plastics &amp; Articles thereof</i>	-4,554,350,187	0.94
<i>Tanning or Dyeing Extracts; Tannins &amp; Derivatives; Dyes, Pigments &amp; Coloring Matt</i>	-972,176,244	0.93
<i>Aluminum &amp; articles thereof</i>	-1,133,052,726	0.93
<i>Articles of Iron or Steel</i>	-2,847,171,782	0.92
<i>Special Woven Fabrics; Tufted Textile Fabrics; Lace; Tapestries; Trimmings; Embroil</i>	-216,228,751	0.91
<i>Railway or Tramway. Locomotives, Rolling Stock, Track Fixtures &amp; parts thereof; M</i>	-103,500,721	0.89
<i>Inorganic Chemicals; Organic or Inorganic Compounds of Precious Metals, of Rare-e</i>	-1,646,920,607	0.89
<i>Edible Vegetables &amp; Certain Roots &amp; Tubers</i>	-399,709,919	0.86
<i>Impregnated, Coated, Covered or Laminated Textile Fabrics; Textile articles for I</i>	-461,119,368	0.81
<i>Explosives; Pyrotechnic products; Matches; Pyrophoric Alloys; Certain Combustible</i>	-102,803,729	0.79
<i>Oil Seeds &amp; Oleaginous Fruits; Miscellaneous Grains, Seeds &amp; Fruit; Industrial or</i>	-1,257,611,758	0.73
<i>Knitted or Crocheted Fabrics</i>	-1,184,564,220	0.73
<i>Sugars &amp; Sugar Confectionary</i>	-1,684,610,333	0.72
<i>Essential Oils &amp; Retinoid; Perfumery, Cosmetic or Toilet Preparations</i>	-277,006,765	0.71
<i>Arms &amp; Ammunition; parts and accessories thereof</i>	-116,800,788	0.70
<i>Organic Chemicals</i>	-4,071,549,241	0.70
<i>Edible Fruit &amp; Nuts; Citrus Fruit or Melon Peel</i>	-446,836,592	0.69
<i>Live Animals</i>	-220,735,519	0.65
<i>Fur skins &amp; Artificial Fur; Manufactures thereof</i>	-708,939	0.56
<i>Silk, including Yarns and Woven Fabric thereof</i>	-4,466,039	0.52
<i>Articles of Stone, Plaster, Cement, Asbestos, Mica or similar materials</i>	-162,612,409	0.50
<i>Zinc &amp; articles thereof</i>	-313,648,111	0.41
<i>Food Industry Residues &amp; Waste; Prepared Animal Feed</i>	-2,173,352,023	0.25
<i>Lac; Gums, Resins &amp; other Vegetable Sap &amp; Extracts</i>	-6,460,089	0.24
<i>Other Vegetable Textile Fibers; Paper Yarn &amp; Woven Fabrics of Paper Yarn</i>	-22,249,568	0.24
<i>Other products of Animal Origin</i>	-46,226,777	0.21
<i>Printed Books, Newspapers, Pictures &amp; other Products of Printing Industry; Manuscript</i>	-73,020,134	0.20
<i>Aircraft, Spacecraft &amp; parts thereof</i>	-4,284,946,118	0.16
<i>Salt; Sulfur; Earth &amp; Stone; Lime &amp; Cement Plaster</i>	-986,657,025	0.14
<i>Wool &amp; Animal Hair, including Yarn &amp; Woven Fabric</i>	-88,468,281	0.08

Sumber: Diolah sendiri menggunakan data WTO (HS-2), Indonesia

**Tabel 5. Proporsi Investasi Jangka Panjang terhadap Kawasan, 2012**

Negara	% terhadap Total Intra FDI	% terhadap Total Extra FDI
Brunei	0.4%	1%
Kamboja	1.3%	1%
Indonesia	46.6%	12%
Laos	0.3%	0%
Malaysia	14.9%	10%
Myanmar	1.2%	2%
Filipina	-0.4%	2%
Singapura	24.1%	56%
Thailand	3.2%	9%
Viet Nam	8.5%	7%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Diolah sendiri menggunakan data Table 25 ASEAN Secretariat

**Tabel 6. Proporsi Investasi Jangka Panjang terhadap Total per Negara, 2012**

Negara	Intra- ASEAN	Extra- ASEAN
Indonesia	43%	57%
Kamboja	25%	75%
Malaysia	22%	78%
Vietnam	20%	80%
Laos	18%	82%
Myanmar	10%	90%
Singapura	8%	92%
Thailand	6%	94%
Brunei	6%	94%
Filipina	4%	96%

Sumber: Diolah sendiri menggunakan data Table 25 ASEAN Secretariat

**Tabel 7. Intra-Regional Trade menurut Negara Anggota ASEAN, 2011**

Negara	Intra	Extra	% Intra pada Total Intra
Brunei	19.65%	80.35%	0.5%
Kamboja	23.39%	76.61%	0.5%
Indonesia	26.08%	73.92%	16.6%
Laos	63.96%	36.04%	0.4%
Malaysia	26.01%	73.99%	18.1%
Myanmar	48.29%	51.71%	1.2%
Filipina	21.19%	78.81%	4.0%
Singapura	26.53%	73.47%	34.4%
Thailand	24.29%	75.71%	18.6%
Viet Nam	17.18%	82.82%	5.7%
<b>ASEAN</b>	<b>25.05%</b>	<b>74.95%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Diolah sendiri menggunakan data Table 18 ASEAN Secretariat

**Tabel 8. Konvergensi Ekonomi Negara Anggota ASEAN, 2012**

Negara	GNI per Kapita, Metode Atlas (Harga Berlaku, US\$)	Total Populasi	PDB (Harga Berlaku, US\$)	Pertumbuhan PDB (tahunan %)	PDB per Kapita (Harga Berlaku, US\$)
Singapura	47,210	5,312,400	274,701,299,734	1.32	51,709
Brunei	34,173	412,238	16,953,952,625	2.15	41,127
Malaysia	9,820	29,239,927	305,032,745,225	5.64	10,432
Thailand	5,210	66,785,001	365,965,815,820	6.49	5,480
Indonesia	3,420	246,864,191	878,043,027,882	6.23	3,557
Filipina	2,500	96,706,764	250,182,019,476	6.81	2,587
Vietnam	1,550	88,775,500	155,820,001,920	5.25	1,755
Laos	1,270	6,645,827	9,417,665,586	8.20	1,417
Kamboja	880	14,864,646	14,038,383,450	7.26	944
Myanmar	284	52,797,319	14,171,358,123	13.64	268

Sumber: Diolah sendiri menggunakan data Table 18 ASEAN Secretariat

## Referensi

- Akamatsu, K (1944). *Keisei Shinchitujo no Keisei Genli (The Theory of Formation of the New Economic Order)*, Tokyo: Lisosha
- Balassa, B (1961), *The Theory of Economic Integration*, Homewood, IL: Richard D. Irwin
- CSIS (2014), *Dampak FTA di Indonesia: Studi dan Hasil Survei Perspektif Bisnis 2013*, CSIS, Jakarta
- Dollar, D and Aart Kraay (2004), *Trade, Growth and Poverty*, Economic Journal, Royal Economic Society, Vol. 114 (493), pp.22-49
- Park, D., I.Park and G.B. Estrada (2008). "Prospects for an ASEAN-People's Republic of China Free Trade Area: A Quantitative and Qualitative Analysis". *ADB Economics Working Paper Series no.130*
- Soesastro, H (2001), *Strategies Towards the Development of New Regional Trading Arrangements in East Asia*, PECC Trade Forum, Vancouver 11-12 November 2002
- Urata, Shujiro (1993). "Japanese Foreign Direct Investment and Its Effect on Foreign Trade in Asia" in *Trade and Protection*, edited by T. Ho and A.O. Krueger, pp.273-304, Chicago: University of Chicago Press
- Verico, K (2012), "Can ASEAN achieve economic community?", *the Jakarta Post*, December 24<sup>th</sup>, 2012 pada link <http://www.thejakartapost.com/news/2012/12/24/can-asean-achieve-economic-community.html>
- Verico, K (2013), "ASEAN Economic Integration: Challenges and Strategies", *the GoLive Indonesia*, May 2<sup>nd</sup>, 2013 pada link <http://goliveindonesia.com/2013/05/02/asean-economic-integration-challenges-and-strategies/>
- Verico, K (2013), *The Impacts of Discriminative Trade Arrangements on Foreign Direct Investment and Foreign Trade in Southeast Asia during the 1988-2008 Period*, Waseda University - Tokyo pada link <http://dspace.wul.waseda.ac.jp/dspace/handle/2065/40016>
- Verico, K (2013), "The Global Trade Landscape and RI's Options", *Australian National University of the Asia-Pacific of the Indonesia Project* pada link <http://asiapacific.anu.edu.au/blogs/indonesiaproject/?p=3904>
- Vernon, R (1966), *International Investment and International Trade in the Product Cycle*, *the Quarterly Journal of Economics*, Vol.80, No.2, pp. 190-207
- Viner, J (1950), *The Custom Union Issue*, New York: Carnegie Endowment for International Peace

\*Penulis adalah Staf Pengajar di FEB UI dan Wakil Kepala Bidang Penelitian LPEM FEB UI, meraih gelar PhD di bidang Studi Internasional (*Integrasi Ekonomi Kawasan*) dari Waseda University, Tokyo, Jepang

---

<sup>i</sup> Secara umum tulisan ini mengacu pada disertasi penulis

<sup>ii</sup> Dalam konteks jaringan produksi global, sebuah negara produsen melakukan investasi di beberapa negara berbeda tergantung pada produktifitas dan efisiensi produksi di masing-masing negara untuk mencapai efisiensi produksi. Tulisan ini menegaskan bahwa dalam efisiensi produksi sebuah produk yang melibatkan beberapa negara akan tercapai ketika setiap negara memproduksi bagian-bagiannya sesuai dengan efisiensi produksinya. Studi ini mendukung konsep 'flying geese model' (Akamatsu, 1944).

<sup>iii</sup> Dirjen WTO Pascal Lamy menyampaikan pidato di Bangalore, India pada tanggal 17 January 2007 menjelaskan bahwa kerjasama ekonomi kawasan itu seperti bumbu di dalam kari yang membuat masakan semakin lezat: "Pepper adds taste and can improve a sauce but pepper alone is not tasty, and good pepper in a poor sauce, will not do the trick! Use the wrong recipe and it will be a disastrous dinner".

<sup>iv</sup> Kerjasama kawasan melalui beberapa tahap (Viner, 1950; Balassa 1961) dimulai dari *Free trade agreement (FTA)*, *Customs Union (CU)*, *Common Market (CM)*, and *Single Monetary Union (SMU) & Single Currency (SC)*. Secara teknis kerjasama kawasan dimulai dari perdagangan (PTA atau FTA) lalu investasi (CU) kemudian liberalisasi sektor jasa terkait perdagangan dan sektor jasa keseluruhan (CM) hingga integrasi keuangan (SMU) dan terciptanya mata uang tunggal (SC). Teori ini didasarkan pada kondisi UE dan terbukti secara empiris di UE

---

dengan terbentuknya mata uang tunggal Euro pada tahun 2002, jauh setelah teori ini dikemukakan oleh Viner dan Balassa.

<sup>v</sup> Pertanyaan serupa pernah diungkapkan oleh penulis pada artikel Verico, K., “Can ASEAN achieve economic community?”, *the Jakarta Post*, December 24, 2012 pada link berikut <http://www.thejakartapost.com/news/2012/12/24/can-asean-achieve-economic-community.html>

<sup>vi</sup> Tantangan dan strategi ASEAN dalam mewujudkan kerjasama kawasan yang solid pernah diungkapkan penulis pada artikel berikut Verico, K., “ASEAN Economic Integration: Challenges and Strategies”, *the GoLive Indonesia*, May 2<sup>nd</sup>, 2013 pada link <http://goliveindonesia.com/2013/05/02/asean-economic-integration-challenges-and-strategies/>

<sup>vii</sup> 
$$RCA_{to} = \frac{X_{ij_{to}} / X_{j_{to}}}{X_{iw_{to}} / X_{w_{to}}}$$

Variabel:  $X_{ij_{to}}$  = Nilai Ekspor komoditi  $i$  negara  $j$  pada waktu  $to$ ;  $X_{j_{to}}$  = Nilai Total Ekspor negara  $j$  pada waktu  $to$ ;  $X_{iw_{to}}$  = Nilai Ekspor komoditi  $i$  di dunia (W) pada waktu  $to$ ;  $X_{w_{to}}$  = Total ekspor dunia (W) pada waktu  $to$ .

<sup>viii</sup> Dapat dilihat pada <http://jkaonline.typepad.com/a/6a00e0098d855588330154349ffd5970c-p>

<sup>ix</sup> <http://www.aienetwork.org/images/infographs/may2013/full/how-well-is-asean-doing-in-achieving-the-aec.png>

<sup>x</sup> Verico (2013)

<sup>xi</sup> Potensi berkurangnya kepercayaan dunia ekonomi internasional pada citra Indonesia bisa terjadi bila sebuah keputusan kerjasama ekonomi antarnegara baik bilateral, regional maupun global yang telah melalui proses negosiasi yang panjang bahkan bertahun-tahun bisa saja dibatalkan mengingat UU Perdagangan RI, Bab XII Kerjasama Perdagangan Internasional Pasal 84 (1) Setiap perjanjian perdagangan internasional disampaikan kepada DPR paling lama 90 hari kerja setelah penandatanganan perjanjian dan Pasal 84 (5) Dalam hal perjanjian internasional yang dapat membahayakan kepentingan nasional, DPR bisa menolak perjanjian perdagangan internasional. Terdapat setidaknya 3 (tiga) resiko pada pasal ini yaitu *principle-agent problem (asymmetric information)* antara DPR dan Pemerintah, *different interest risk* antara populis dan efektif dalam menyikapi biaya dan manfaat perjanjian jangka pendek vs jangka panjang dan *time-frame risk* terutama negosiasi yang dilakukan lebih dari satu periode pemerintahan karena negosiasi yang sudah lama dilakukan sangat bisa dinilai oleh anggota DPR yang baru terpilih. Diperlukan sebuah sikap bijaksana yang didasarkan pada perhitungan yang sangat matang dari sisi biaya dan manfaat agar Indonesia terhindar dari keputusan yang kontra produktif.

<sup>xii</sup> Estimasi proses pencapaian ASEAN menuju mata uang tunggal ASEAN berikut tantangan dan strategi yang harus disiapkan dapat dilihat pada Verico, 2013 di link berikut:

<http://asiapacific.anu.edu.au/blogs/indonesiaproject/2013/05/03/asean-economic-integration-challenges-and-strategies/>

Penulis berpendapat ASEAN berpotensi mencapai kerjasama mata uang tunggal ASEAN paling cepat pada tahun 2050